



## ANALISIS PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA BAGI HASIL (DBH) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA MODAL DI KABUPATEN SOLOK SELATAN

TAHUN 2006-2021

Hanif Fuady<sup>1\*</sup>, Weriantoni<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas, <sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas

\*Corresponding author: [haniffuady45@gmail.com](mailto:haniffuady45@gmail.com) , [weriantoni@eb.unand.ac.id](mailto:weriantoni@eb.unand.ac.id)

### Abstract

*Regional autonomy is carried out when the area has readiness, both in terms of resources and the ability to manage the area. Local governments need to allocate funds to improve the quality of public services. The form is Capital Expenditure contained in the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). Therefore, the function and role of DAU, DBH and PAD in local government, the purpose of this research is to analyze how the General Allocation Fund (DAU) affects capital expenditure simultaneously or partially in South Solok Regency, followed by the Revenue Sharing Fund (DBH). effect on Capital Expenditure simultaneously or partially in South Solok Regency. The same thing also applies to PAD to analyze Regional Original Income (PAD) which affects Capital Expenditure simultaneously or partially in South Solok Regency. This study uses multiple data regression analysis for South Solok Regency in 2006-2021 which is processed using Eviews 9 with the dependent variable being Capital and the independent variables being DAU, DBH and PAD. The results of this research indicate that the DAU has a positive and significant effect on capital expenditures. DBH and PAD have a negative effect on capital expenditures.*

**Keywords:** *Regional autonomy, DAU, DBH dan PAD*

### Abstrak

Otonomi daerah dilakukan pada saat daerah tersebut mempunyai kesiapan, baik dari segi sumber daya maupun kemampuan untuk memanagerial daerah. Pemerintah daerah perlu mengalokasikan dana untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Bentuknya adalah Belanja Modal yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, fungsi dan peran DAU, DBH dan PAD dalam pemerintahan daerah tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis bagaimana Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal secara simultan maupun secara parsial di Kabupaten Solok Selatan yang diikuti Dana Bagi Hasil (DBH) bagaimana berpengaruh terhadap Belanja Modal secara simultan maupun secara parsial di Kabupaten Solok Selatan. Hal yang sama juga pada PAD untuk menganalisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal secara simultan maupun secara parsial di Kabupaten Solok Selatan. Penelitian ini menggunakan alat analisis Regresi Data berganda Kabupaten Solok Selatan tahun 2006-2021 yang diolah menggunakan Eviews 9 dengan variabel dependent yaitu Modal dan variabel independent yaitu DAU, DBH dan PAD. Hasil riset ini menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. DBH dan PAD berpengaruh negatif terhadap belanja modal.

**Kata Kunci:** *Otonomi Daerah, DAU, DBH dan PAD*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Otonomi daerah memunculkan kabupaten dan kota baru di Indonesia Khususnya di Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan kabupaten pertama yang muncul karena otonomi daerah. Selang lima tahun kemudian Sumatera Barat Mendapatkan tambahan kabupaten baru yaitu Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Pasaman Barat dengan payung hukum Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003.

Kabupaten Solok Selatan terbentuk pada tahun 2004, setelah dikeluarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Negara, memiliki wilayah dari Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Sangir, Kecamatan Sangir Jujuan, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kecamatan Sangir Balai Janggo dan Kecamatan Pauh Duo. Kabupaten Solok Selatan merupakan suatu daerah yang terbelakang hal ini disebabkan karena posisi Kabupaten Solok Selatan tidaklah strategis, bahkan daerah ini hanya dilewati satu jalan yang menghubungkan Lubuk Selasih dengan Kabupaten Kerinci. Walaupun sedang dilakukan pembangunan jalan menuju Dharmasraya, baik dari ruas Abai Sangir –Pulau Punjung maupun Sungai Kunyit – Sungai Rumbai, namun belum mampu menghubungkan Kabupaten Solok Selatan kearah timur. Belum Lagi, pembangunan jalan ke pantai barat Sumatera yang tidak pernah terwujud, disebabkan harus menjaga Taman Nasional Kerinci Seblat. Dengan Kondisi prasarna jalan yang tidak pernah bagus, membuat Kabupaten Solok Selatan Menjadi begitu tidak aksesibel dari arah manapun.

Otonomi daerah dilakukan pada saat daerah tersebut mempunyai kesiapan, baik dari segi sumber daya maupun kemampuan untuk memanajerial daerah. Pemerintah daerah perlu mengalokasikan dana untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Bentuknya adalah Belanja Modal yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan diterapkannya kebijakan otonomi daerah, telah terjadi perubahan akses dan sumber daya keuangan bagi daerah, terutama ketika komponen dana pemerataan dimasukkan dalam sikap APBD. Dalam rangka otonomi daerah DAU, DBH dan PAD merupakan sumber pendapatan daerah yang digunakan pemerintah daerah untuk mendanai berbagai kebutuhan. Termasuk di dalamnya belanja modal oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang unggul. Oleh karena itu, fungsi dan peran DAU, DBH dan PAD dalam pemerintahan daerah menjadi sangat penting. perbedaan jumlah antara DAU, DBH dan PAD di Kabupaten Solok Selatan tiga tahun terakhir mengalami ketimpangan. DAU yang diterima Kabupaten Solok Selatan pada tahun terakhir 2021 sebesar 437.170 Juta Rupiah, DBH sebesar 52.690 Juta Rupiah, PAD kabupaten Solok Selatan berjumlah 80.459 Juta Rupiah. Belanja Modal di Kabupaten Solok Selatan berjumlah 127.046 Juta Rupiah.

Apabila menggunakan Perbandingan Daerah Kabupaten Solok Selatan dengan kabupaten lainnya, maka dibandingkan dengan Kabupaten Dharmasraya mengalami ketertinggalan dalam sisi Realisasi APBD. Bisa Dilihat dari DAU Kabupaten Solok Selatan dibandingkan dengan Kabupaten Dharmasraya dengan tahun yang sama yaitu 2021, maka DAU Kabupaten Solok Selatan sebesar 437.170 Juta Rupiah ini lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Dharmasraya yang berjumlah 472.416 Juta Rupiah. Berbanding terbalik dengan DBH Kabupaten Solok Selatan, jumlah DBH Kabupaten Solok Selatan tahun 2021 sebesar 52.690 Juta Rupiah dibandingkan dengan Kabupaten Dharmasraya, maka DBH Kabupaten Solok Selatan lebih besar daripada Kabupaten Dharmasraya yang hanya berjumlah 34.810 Juta Rupiah. Berbeda dengan PAD kabupaten Solok Selatan, Jika dibandingkan dengan PAD, jumlah PAD Kabupaten Solok selatan hanya berjumlah 80.459 Juta Rupiah, lebih rendah daripada dengan Kabupaten Dharmasraya yang berjumlah 82.779 Juta Rupiah. Belanja Modal di Kabupaten Solok Selatan terbilang rendah, Belanja modal di Kabupaten Solok Selatan berjumlah 127.046 Juta Rupiah berbanding terbalik dengan Kabupaten Dharmasraya yang berjumlah 160.000 Juta Rupiah. Membandingkan Kabupaten Solok Selatan dengan Kabupaten Dharmasraya dari hal tersebut, karena alasannya Kabupaten Dharmasraya merupakan Kabupaten Maju yang sebelumnya diklasifikan dari Kabupaten berkembang, yang berbeda sekali dengan Kabupaten Solok Selatan.

## **Tujuan**

Fenomena yang sering terjadi adalah masalah ketimpangan daerah dalam Otonomi daerah dan juga sumber pendanaan yang berasal dari DAU, DBH dan PAD baik di dalam daerah maupun antar daerah. Dengan demikian, tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis bagaimana Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal secara simultan maupun secara parsial di Kabupaten Solok Selatan yang diikuti Dana Bagi Hasil (DBH) bagaimana berpengaruh terhadap Belanja Modal secara simultan maupun secara parsial di Kabupaten Solok Selatan. Hal yang sama juga pada PAD untuk menganalisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal secara simultan maupun secara parsial di Kabupaten Solok Selatan.

## **Manfaat**

Manfaat yang didapatkan dari penelitian adalah Memberikan informasi kepada pemerintah pusat dan daerah dalam menetapkan kebijakan ke depan Pemerintah diharapkan lebih memperhatikan variabel pendapatan mana yang harus dikembangkan atau ditingkatkan untuk kesejahteraan manusia dan pertumbuhan ekonomi, sehingga belanja modal dapat terpenuhi dalam bidang apapun dan juga dapat membantu pemerintah atau instansi terkait informasi Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2006-2021.

## **LITERATUR REVIEW DAN HIPOTESIS**

### **Literatur Review**

#### **Otonomi Daerah**

Otonomi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu *autos* (sendiri) dan *nomos* (peraturan) atau “undang-undang”. Dari teori mengenai otonomi daerah tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa otonomi artinya seperangkat aturan atau undang-undang sendiri yang selanjutnya mengalami perkembangan menjadi pemerintahan sendiri (Dharma Setyawan, 2007).

Pemerintahan daerah yang otonom merupakan tatanan konstitusional bukan sekedar tatanan administrasi negara. Seperti tatanan konstitusional, otonomi terkait langsung dengan dasar negara dan struktur organisasinya. Ada dua arah dasar bagi tatanan konstitusional dalam perumahan Indonesia merdeka, yaitu demokrasi dan administrasi publik berbasis aturan. Otonomi tidak hanya mengacu pada kelaziman pemerintahan dalam mencapai tujuan efisiensi dan efektivitas (Bagir Manan, 2002).

#### **Desentralisasi Fiskal**

Desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan daerahnya. Desentralisasi merupakan simbol atau tanda kepercayaan negara terhadap daerah yang akan mengembalikan harga diri negara dan masyarakat daerah. (Ni'matul Huda, 2005).

Berlakunya UU No. 32 dan UU No. 33 tahun 2004, maka pemerintah mendesentralisasikan kekuasaan ke daerah yang berarti rumah tangga di daerah tidak lagi dikelola dan diatur oleh pemerintah pusat. Kekuasaan ini sepenuhnya dimiliki oleh penduduk di daerah tersebut. Peran pemerintah pusat hanya sebagai supervisor, control, monitor dan evaluator. Oleh karena itu, merupakan sarana untuk mencapai tujuan bernegara guna mewujudkan masyarakat demokratis yang bersatu. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai konstitusi negara, selalu menekankan konsep negara sebagai bentuk keseimbangan antara kebutuhan untuk memperkuat persatuan nasional dan kebutuhan untuk melaksanakan otonomi daerah.

## **Teori Pengeluaran Pemerintah**

Pengeluaran Pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal, tindakan pemerintah untuk mengatur perekonomian agar berjalan dengan baik. Setiap tahun, pemerintah menetapkan penerimaan dan pengeluaran yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) untuk daerah. Tujuan dari kebijakan fiskal itu sendiri adalah untuk menstabilkan harga, tingkat produksi, kesempatan kerja, dan merangsang atau mendorong pertumbuhan ekonomi (Sadono Sukirno, 2000).

## **Teori Transfer**

Jenis dana bantuan (Grant) dibagi menjadi dua bagian yaitu conditional grant atau categorical grant dan unconditional grant. Conditional Grant adalah Transfer khusus yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk tujuan tertentu, seperti biaya operasional sekolah (BOS) dan jaring pengaman sosial (JPS). Jadi, conditional grant mirip dengan hibah pendamping. Unconditional grant kepada pemerintah daerah. Tidak ada syarat tertentu dan biasanya melibatkan bisnis manufaktur untuk berinvestasi di entitas komersial. Seringkali, unconditional grant juga dikenal sebagai bagi hasil atau revenue sharing (Rosen, 2002).

## **Teori Agensi**

Menurut Jensen dan Meckling (1976), hubungan keagenan adalah kontrak antara prinsipal dan prinsipal yang mempertimbangkan desentralisasi beberapa kekuasaan pengambilan keputusan kepada prinsipal. Teori principal-agent membayangkan kolaborasi antara dua individu, kelompok, atau organisasi masyarakat. Kelompok atau klien tertentu mengadakan kontrak secara langsung atau tidak langsung. Dalam hal ini, bekerja secara langsung dengan kelompok lain (agen) dengan harapan agen akan bertindak atau melakukan pekerjaan yang ingin dilakukan agen di legislatif dan pemerintahan.

## **Belanja Modal**

Menurut (Halim, 2002), Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang dapat memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah daerah dapat mampu menggali atau mencari sumber-sumber keuangan yang khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. belanja modal meliputi yakni, belanja modal untuk perolehan tanah gedung dan bangunan, peralatan serta aset tak berwujud (Erlina, 2015).

Setiap pembangunan suatu daerah, Belanja Modal memiliki manfaat dan peranan yang sangat penting karena memiliki masa manfaat yang sangat lama atau jangka panjang untuk memberikan pelayanan publik. Belanja modal ini didasarkan kepada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas public. (Mayasari dkk, 2014).

## **Dana Alokasi Umum (DAU)**

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau disebut (APBN) yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum begitu besar sehingga merupakan sumber pendapatan terpenting bagi semua pemerintah daerah dalam anggaran pendapatan APBN-nya. Oleh karena itu Dana Alokasi Umum dapat dilihat sebagai tanggapan pemerintah terhadap keinginan daerah untuk lebih mengontrol keuangan publik. ((Halim, 2002).

Manfaat Dana Alokasi Umum (DAU) adalah untuk mengatasi disparitas keuangan atau ketimpangan fiskal keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang disebabkan oleh tidak meratanya distribusi sumber daya di setiap daerah. Penggunaan Dana Alokasi Umum ditentukan oleh daerah, dan bagian ini memperkirakan besaran Dana Alokasi Umum sesuai dengan alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Dana Alokasi Umum menggunakan formula yang mempertimbangkan

beberapa aspek seperti luas wilayah, jumlah penduduk, kepadatan penduduk, indeks harga bangunan, dan jarak garis kemiskinan.

### **Dana Bagi Hasil (DBH)**

Berdasarkan Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004, Dana Bagi hasil (DBH) merupakan dana dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan kepada angka persentase untuk membiayai kebutuhan daerah yang terkait dengan pelaksanaan desentralisasi. Pembagian DBH ini melihat dari kemampuan daerah dalam menghasilkan sumber daya. Jika daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah maka akan mendapatkan porsi yang lebih besar sesuai dengan kekayaan alam yang telah digali. DBH diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah, dengan memperhatikan potensi daerah produksi. DBH dialokasikan kepada areal produksi menurut perbandingan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dan apabila dibagi dengan bagian areal produksi, maka mendapat bagian yang lebih besar, dan bidang-bidang lain (dalam negara) dipersamakan dengan bagian tertentu yang telah sesuai dengan Undang-undang. Berdasarkan Pasal 23 Nomor 33 Tahun 2004, prinsip penyaluran DBH didasarkan pada realisasi penerimaan negara yang dibagi (berdasarkan penerimaan yang sebenarnya) pada tahun anggaran berjalan.

### **Pendapatan Asli Daerah**

Setiap daerah memiliki kekuatan dan kewajiban untuk menggali sumber daya keuangannya sendiri, dan pendapatan asli daerah (PAD) untuk memungkinkan pemerintah daerah memenuhi tanggung jawab pemerintahnya dan melakukan pembangunan yang lebih dan lebih stabil untuk kepentingan rakyat. segala upaya untuk menambah jumlah orang. Memperluas peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah perlu lebih mandiri dalam mendanai kegiatan penganggaran. Berdasarkan hal tersebut, kita dapat melihat bahwa pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan dari belanja daerah. Karena saling terkait dan mewakili alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk mempercepat roda pemerintahan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 pasal 1 angka 18 mengenai Pemerintahan Daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan Yang didapatkan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Pasal 3 ayat 1, PAD bertujuan untuk “mengizinkan pemerintah daerah mendanai pelaksanaan otonomi daerah, tergantung pada potensi daerah sebagai wujud desentralisasi”.

Menurut (Halim, 2002) seluruh Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah dari sumber ekonomi utama daerah. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa PAD merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah masing-masing, yang dilaksanakan dengan peraturan daerah.

### **Hipotesis Penelitian**

Hipotesis merupakan pendapat atau dugaan sementara, dimana dugaan ini masih harus diuji kembali kebenarannya. Hipotesis merupakan salah satu instrumen terkait dalam teori yang ada dalam suatu penelitian. Pertama, diduga Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal secara simultan maupun secara parsial di Kabupaten Solok Selatan . Kedua, diduga Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Belanja Modal secara simultan maupun secara parsial di Kabupaten Solok Selatan. Ketiga, diduga Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal secara simultan maupun secara parsial di Kabupaten Solok Selatan.

## METODE PENELITIAN

### Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data tentang Belanja Modal di Kabupaten Solok Selatan, faktor-faktor yang diduga mempengaruhinya, meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2006 sampai tahun 2021. Data ini didapatkan dari Badan pusat statistik (BPS), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk), jurnal- jurnal sebelumnya dan dari buku.

### Variabel Penelitian

Variabel penelitian dapat diartikan sebagai hal-hal yang menjadi objek pengamatan penelitian atau faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian dan gejala subjek penelitian (Wiratha, 2006). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel terikat dan variabel bebas.

#### Variabel Dependen (Y)

Variabel Dependent atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Besarnya variabel terikat tergantung dari besaran variabel bebas. Pada penelitian ini variabel dependennya adalah Belanja Modal Kabupaten Solok Selatan Dengan satuan Rupiah. Data yang dipakai adalah data Belanja Modal dari tahun 2006 sampai tahun 2021 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).

#### Variabel Independen (X)

Variabel Independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi, yang mengakibatkan timbulnya atau berubahnya variabel terikat. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut yaitu pertama, Dana Alokasi Umum (DAU) (X1) merupakan hasil total dari pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan yang sah di Kabupaten Solok Selatan dalam satuan Rupiah dari tahun 2006-2021. Kedua, Dana Bagi Hasil (DBH) (X2) merupakan DBH yang terdiri dari DBH hasil pajak dan dan bukan pajak dan Kabupaten Solok Selatan dari tahun 2006-2021 dalam satuan Rupiah. Ketiga, Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X3) merupakan hasil total dari pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan yang sah di Kabupaten Solok Selatan dalam satuan Rupiah dari tahun 2006-2021.

### Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dan deskriptif. Sebelumnya model akan diuji asumsi klasik agar hasil estimasi regresi yang dilakukan benar-benar bebas dari adanya gejala multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik digunakan agar tidak terjadi penyimpangan yang serius dari asumsi yang harus dipenuhi dalam metode Ordinary Least Square (OLS). Estimator OLS harus memenuhi asumsi- asumsi yang memiliki sifat Best Linear Unbiased Estimator (BLUE). Selain itu, model juga harus memakai uji F untuk mengetahui pengaruh secara simultan variabel bebas terhadap variabel terikat dan uji T untuk mengetahui pengaruh secara parsial masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengolahan data menggunakan program aplikasi Eviews 9.

Menurut Gujarati (2003), bentuk umum fungsi model regresi linear berganda adalah :

$$Y = f(X_1, X_2, X_3) \dots\dots\dots (i)$$

Dimana :

Y = Variabel Dependen

X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, X<sub>3</sub> = Variabel Independent

Fungsi diatas kemudian dapat diturunkan menjadi persamaan regresi berganda sebagai berikut (Gujarati, 2003) :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon \dots\dots\dots (ii)$$

Dimana :

- Y = Belanja Modal Kabupaten Solok Selatan (Juta Rupiah)
- X1 = Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Solok Selatan (Juta Rupiah)
- X2 = Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten Solok Selatan (Juta Rupiah)
- X3 = Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Solok Selatan (Juta Rupiah)
- $\beta_0$  = Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = Koefisien Regresi
- $\epsilon$  = Error

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Hasil pengolahan data empiris untuk membuktikan hipotesis yang diajukan penulis yaitu untuk menunjukkan pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) , Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal Kabupaten Solok Selatan dari tahun 2006-2021. Data tersebut diolah dengan menggunakan program Eviews 9. Dengan menggunakan variabel yang diyakini mempengaruhi belanja modal di Kabupaten Solok Selatan, data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk).

Regresi merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar variabel. Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel Independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis regresi linear berganda yang dimaksud untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) , Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal di Kabupaten Solok Selatan. Berdasarkan hasil dari pengolahan data menggunakan program Eviews 9 sehingga menghasilkan hasil regresi sebagai berikut:

**Tabel 1.** Uji Regresi

Dependent Variable: BELANJAMODAL\_Y  
 Method: Least Squares  
 Date: 05/17/22 Time: 10:13  
 Sample: 2006 2021  
 Included observations: 16

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	10660.07	32024.09	0.332877	0.7450
DAU_X1	0.617897	0.115510	5.349296	0.0002 *
DBH_X2	-1.096403	0.590696	-1.856119	0.0881**
PAD_X3	-1.250193	0.496310	-2.518975	0.0270 *
R-squared	0.834793	Mean dependent var		153362.9
Adjusted R-squared	0.793492	S.D. dependent var		52667.24
S.E. of regression	23933.67	Akaike info criterion		23.21628
Sum squared resid	6.87E+09	Schwarz criterion		23.40943
Log likelihood	-181.7302	Hannan-Quinn criter.		23.22617
F-statistic	20.21210	Durbin-Watson stat		2.297684
Prob(F-statistic)	0.000055			

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan hasil regresi pada tabel diatas, maka dapat dibuat persamaan regresi bergandanya adalah sebagai berikut:

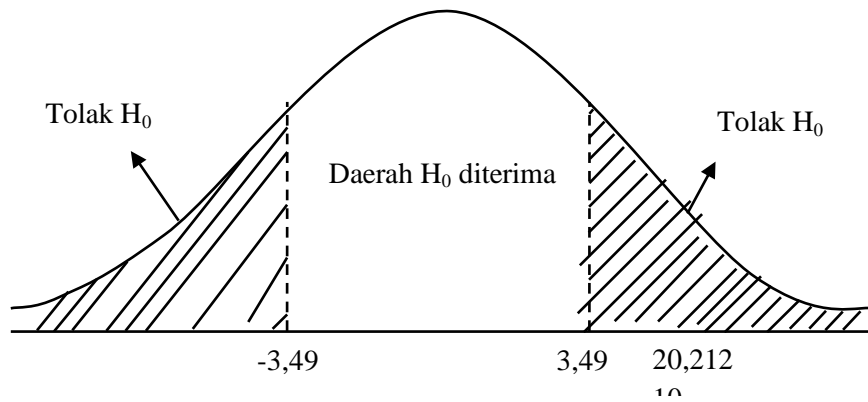
$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

$$Y = -10660.07 + 0.617897 X_1 - 1.096403 X_2 - 1.250193 X_3 + \epsilon$$

**Uji Simultan Keseluruhan (Uji F)**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka didapatkan nilai F-hitung sebesar 20.21210 sedangkan F-tabel dihitung dengan cara  $df_1 = k-1$  dan  $df_2 = n-k$ , dimana k adalah jumlah variabel dependen (1) dan variabel independen (2), dan n adalah jumlah data (16), sehingga didapatkan nilai F-tabel (3;12) sebesar 3,49 berarti bahwa  $F\text{-hitung} > F\text{-Tabel}$  ( $20,21210 > 3,49$ ), maka sesuai dengan kriteria kedua bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima dengan Formulasi  $H_a : \beta_0 \neq \beta_1 \neq \beta_2 \neq 0$ . Sehingga dapat diinterpretasikan bahwa pada derajat kepercayaan 95 persen ( $\alpha = 0,05$ ), pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) , Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Kabupaten Solok Selatan.

**Gambar 1**  
**Uji Simultan Keseluruhan (Uji F)**



Sumber: Data diolah, 2022

**Pembahasan**

Berdasarkan hasil regresi, Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Dimana nilai koefisien DAU sebesar 0,617897 dengan taraf signifikansi 0,0002 dengan kepercayaan 95% ( $\alpha = 0,05$ ). Persamaan ini dapat dijelaskan jika DAU meningkat sebesar 1 juta rupiah, yang akan meningkatkan belanja modal sebesar 274,318 juta rupiah dengan asumsi DBH dan PAD tidak berubah. Koefisien positif menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara DAU dengan Belanja modal. Nilai signifikansinya adalah  $0,0002 < 0,05$  yang berarti bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Kabupaten Solok Selatan.

Menurut peneliti sendiri, DAU berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal karena DAU merupakan dana yang berasal dari APBN dengan tujuan untuk menyeimbangkan kemampuan keuangan daerah di seluruh daerah dan merupakan bagian integral dari daerah. Pendapatan pemerintah daerah selama ini merupakan subsidi daerah otonom dan arahan presiden,



sehingga DAU bermanfaat bagi pemerintah daerah untuk mendanai daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi serta mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah dengan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Ida Bela Dyah Saputri Ayu (2020) yang mengatakan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016-2018). Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Siti Muniroh (2019) yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi belanja modal.

Selanjutnya membahas mengenai pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal di Kabupaten Solok Selatan. Berdasarkan hasil regresi, Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap belanja modal. Dimana nilai koefisien DBH sebesar  $-1,096403$  dengan taraf signifikansi  $0,0881$  dengan derajat kepercayaan  $90\%$  ( $\alpha = 0,1$ ). Nilai signifikansinya adalah  $0,0881 < 0,1$  yang berarti bahwa DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Kabupaten Solok Selatan. Artinya DBH secara parsial berpengaruh terhadap belanja modal Kabupaten Solok Selatan Tahun 2006-2021 dengan asumsi DAU dan PAD tidak berubah.

Menurut peneliti, berdasarkan hasil pengolahan data Dana Bagi Hasil memiliki tingkat signifikansi sebesar  $0,0881$  yang menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, artinya kondisi ini disebabkan karena kecilnya proporsi penerimaan Dana Bagi Hasil terhadap total penerimaan daerah sehingga daya dorongnya kecil untuk pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal, walaupun Dana Bagi Hasil merupakan hak daerah untuk mengelola penerimaan negara yang dihasilkan oleh masing-masing daerah, tetapi besarnya ditentukan pada produksi daerah berdasarkan ketentuan dari undang-undang undangan yang sah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Ida Abbas, Dirvi Surya dkk (2020) yang menunjukkan bahwa dana bagi hasil memberikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.

Terakhir, menjelaskan pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal di Kabupaten Solok Selatan. Berdasarkan hasil regresi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal. Dimana nilai koefisien PAD sebesar  $-1,250193$  dengan taraf signifikansi  $0,0270$  dengan kepercayaan  $95\%$  ( $\alpha = 0,05$ ). Persamaan ini dapat dijelaskan jika PAD meningkat sebesar 1 juta rupiah, yang akan meningkatkan belanja modal sebesar 270 juta rupiah dengan asumsi DAU dan DBH tidak berubah. Koefisien negatif menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara PAD dengan Belanja modal. Nilai signifikansinya adalah  $0,0270 < 0,05$  yang berarti bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Kabupaten Solok Selatan. Artinya daerah yang telah menerima PAD yang cukup besar namun belum dapat memberikan kontribusi belanja modal karena proporsi PAD yang masih sangat kecil untuk digunakan dalam membiayai belanja modal. Idealnya, belanja modal pemerintah daerah dapat dicukupi dengan PAD. Namun, pada kenyataannya, PAD yang sangat besar biasanya digunakan untuk belanja pegawai dan belanja lainnya.

PAD berpengaruh negatif terhadap belanja modal yang dapat diartikan bahwa PAD akan menurunkan belanja modal. Hal ini disebabkan terjadinya varians yang tidak diinginkan (unfavourable variance), yang berarti kinerja atau realisasi PAD berada di bawah anggaran. Hal ini mencegah PAD melakukan belanja modal secara keseluruhan karena keterbatasan dana. Keterbatasan dana ini menyebabkan tingginya belanja modal, khususnya unfavourable variance belanja modal atau varians variabel belanja modal. Faktor lain yang disinyalir sebagai penyebab

bahwa PAD berpengaruh negatif terhadap belanja modal adalah pemerintah daerah cenderung mengalokasikan PAD untuk mendanai hal-hal lain seperti belanja pegawai yang bersifat lebih mendesak (belanja pegawai tidak dapat ditunda). Seperti yang ditunjukkan data, porsi terbesar adalah belanja pegawai terhadap total belanja dalam Apriyanti et al (2014). Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Ida Febriana (2015) yang menunjukkan bahwa PAD memberikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal.

## SIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal Di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2006-2021, dapat disimpulkan, pada derajat kepercayaan 95% ( $\alpha = 0,05$ ) Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Solok Selatan. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap belanja modal di Kabupaten Solok Selatan tahun 2006-2021. Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap terhadap belanja modal di Kabupaten Solok Selatan tahun 2006-2021. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap terhadap belanja modal di Kabupaten Solok Selatan tahun 2006-2021.

Hasil pengujian R-squared dalam penelitian ini adalah 0.834793 yang menunjukkan bahwa Belanja Modal sebesar 83,47 % dipengaruhi oleh variabel Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sedangkan sisanya 0,165207 atau 16,52 % dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## Implikasi Kebijakan

Berdasarkan temuan empiris dari penelitian ini terdapat beberapa implikasi kebijakan yang diambil adalah sebagai berikut:

### Kebijakan Terhadap Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa variabel DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Solok Selatan, artinya kenaikan jumlah DAU akan diikuti dengan meningkatnya belanja modal di Kabupaten Solok Selatan. Kebijakan yang dapat diambil untuk pemerintah kabupaten Solok Selatan adalah mengoptimalkan penggunaan DAU dengan tidak menggunakan seluruh Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Pengeluaran untuk pegawai tetapi juga menggunakan dana ini untuk mendorong kemajuan di daerah. Kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah daerah adalah kontrol DAU harus diperkuat, melihat lemahnya kinerja daerah yang berdampak pada pengurangan DAU. Untuk mengeluarkan DAU harus ada kesepakatan, misalnya bisa hanya beberapa persen dari gaji pegawai dan sisanya untuk pengembangan. Atau bisa juga indikator kinerja birokrasi yang didapat saat mengeluarkan DAU ke daerah. Karena pemerintah pusat membiayai birokrasi di daerah, maka pemerintah pusat memiliki kekuasaan untuk menyesuaikan operasinya.

### Kebijakan Terhadap Dana Bagi Hasil (DBH)

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa variabel DBH memiliki pengaruh negative dan signifikan terhadap belanja modal di Kabupaten Solok Selatan dengan menggunakan alpha 10 % . Jika DBH memakai alpha 5% tidak dapat dibuat implikasi kebijakan, kalau alpha 10 % maka signifikan yang berarti perlu dibuat implikasi kebijakan. Hal tersebut berarti, setiap peningkatan jumlah DBH akan diikuti dengan menurunnya belanja modal di Kabupaten Solok Selatan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa DBH yang diterima oleh Kabupaten Solok Selatan sangat sedikit, ini dikarenakan DBH Kabupaten Solok Selatan sebagian besar dari sektor pertanian dan sektor perkebunan. Faktor lainnya dipengaruhi adanya masalah keagenan. Dimana pihak eksekutif yaitu

pemerintah Daerah mengajukan anggaran yang disetujui oleh pihak legislative. Hal ini senantiasa terjadi dalam pengelolaan daerah khususnya dalam prose realisasi dan pengelolaan sumber daya dalam belanja modal. Kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan adalah karena Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan sumber pendapatan yang potensial bagi daerah dan salah satu sumber permodalan. Salah satu prinsip dasar pemerintah daerah untuk memperoleh dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah adalah belanja modal. Dengan meningkatkan pajak properti dan harta benda serta pajak pribadi, dimungkinkan untuk meningkatkan Dana Bagi Hasil masing-masing daerah.

#### Kebijakan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki Berpengaruh negatif dan signifikan artinya setiap peningkatan PAD akan diikuti menurunnya Belanja Modal di Kabupaten Solok Selatan. Kebijakan pemerintah yang dapat diambil oleh pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan adalah mendorong bagi peningkatan kapasitas fiskal daerah, masalah ini banyak dihadapi oleh daerah, terutama yang miskin sumber daya alam. Namun hal ini juga tidak menutup kemungkinan akan potensi alam yang kaya sebagai objek wisata. Kebijakan lainnya adalah PAD dapat meningkatkan alokasi modal untuk belanja modal. Oleh karena itu, pemerintah harus mengoptimalkan perannya dalam upaya menggali potensi pendapatan daerah di sisi PAD sehingga porsi belanja modal PAD bisa lebih besar dari sebelumnya.

### **KETERBATASAN DAN SARAN**

Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan agar lebih mengoptimalkan penggunaan Dana Alokasi Umum dengan tidak menggunakan seluruh Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Pengeluaran pegawai tetapi juga menggunakan dana ini untuk mendorong kemajuan di daerah.

Kepada Pemerintah diharapkan berpandangan Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan sumber pendapatan daerah yang potensial dan merupakan salah satu sumber pendanaan utama bagi pemerintah daerah untuk memperoleh dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah, salah satunya belanja modal.

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus memperkuat pengembangan sumber pendapatan asli daerah (PAD) dengan meningkatkan efisiensi administrasi dan pemungutan pajak, serta meningkatkan pengendalian agen untuk meminimalkan kerugian. PAD juga dapat ditingkatkan dengan meningkatkan peran perusahaan di daerah melalui peningkatan laba usaha.

### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Ucapan terimakasih kepada bapak Weriantoni, SE, M.Sc yang telah membantu penelitian sampai selesainya jurnal ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abid, M., Rahayu, S., & Aminah, W. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal (Studi empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2014-2015). *E-Proceeding of Management*, 5(1), 753–759.
- Adyatma, E., & Oktaviani, R. M. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*.
- Andirfa, M., Basri, H., & Majid, M. S. A. (2016). Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi*.
- Arikunto. (2019). Metodologi Penelitian, Suatu Pengantar Pendidikan. In Rineka Cipta, Jakarta (Hal. 21).
- Asmuruf, F., Rumat, V. A., & Kawung, G. M. V. (2015). Pengaruh Pendapatan Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah ( Pad ) Di Kota Sorong. *Jurnal Berkala Ilmu Efisien*.
- Badan Pusat Statistik. 2006. Solok Selatan Dalam Angka 2020. Padang Aro
- Badan Pusat Statistik. 2007. Solok Selatan Dalam Angka 2020. Padang Aro
- Badan Pusat Statistik. 2008. Solok Selatan Dalam Angka 2020. Padang Aro
- Badan Pusat Statistik. 2009. Solok Selatan Dalam Angka 2020. Padang Aro
- Badan Pusat Statistik. 2010. Solok Selatan Dalam Angka 2020. Padang Aro
- Badan Pusat Statistik (2011). Solok Selatan Dalam Angka 2020. Padang Aro
- Badan Pusat Statistik (2012). Solok Selatan Dalam Angka 2020. Padang Aro
- Badan Pusat Statistik (2013). Solok Selatan Dalam Angka 2020. Padang Aro
- Badan Pusat Statistik (2014). Solok Selatan Dalam Angka 2020. Padang Aro
- Badan Pusat Statistik (2015). Solok Selatan Dalam Angka 2020. Padang Aro
- Badan Pusat Statistik (2016). Solok Selatan Dalam Angka 2020. Padang Aro
- Badan Pusat Statistik (2017). Solok Selatan Dalam Angka 2020. Padang Aro
- Badan Pusat Statistik (2018). Solok Selatan Dalam Angka 2020. Padang Aro
- Badan Pusat Statistik (2019). Solok Selatan Dalam Angka 2020. Padang Aro
- Badan Pusat Statistik (2020). Solok Selatan Dalam Angka 2020. Padang Aro
- Badan Pusat Statistik (2021). Solok Selatan Dalam Angka 2021. Padang Aro
- Badan Pusat Statistik (2022). Solok Selatan Dalam Angka 2022. Padang Aro
- Badan Pusat Statistik (2020). Kabupaten Dharmasraya Dalam Angka 2020. Dharmasraya
- Badan Pusat Statistik (2021). Kabupaten Dharmasraya Dalam Angka 2021. Dharmasraya
- Badan Pusat Statistik (2022). Kabupaten Dharmasraya Dalam Angka 2022. Dharmasraya
- Erlina, Sakti Rambe, Rasdianto. 2015. Akuntansi Keunagan Daerah Berbasis Akrua. Jakarta : Salemba Empat.
- Gujarati, Damodar N. 2003. Dasar-dasar Ekonometrika. Jakarta: Erlangga.
- \_\_\_\_\_. 2006. Ekonometrika Dasar. Jakarta : Erlangga.
- Huda, Ni'matul. 2005. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Jensen, M and Mecking, W. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of financial Economics* 3 (4):305-360
- Lane, Jan-Erik. 2000. The Public Sector – Concepts, Models and Approaches. London: SAGE Publications.